



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Hayam Wuruk Plaza Lt.17, Jalan Hayam Wuruk No.108, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat 11160
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 20/KP.02.00/IX/2023

**TENTANG
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditugaskan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa Kepada Tuhan Yang maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melakukan pendaftaran online di SSCASN 2023;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota TNI/Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan bagi pelamar Umum;
11. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan bagi jalur Umum;
12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) bagi pelamar Umum: 2,75.

B. Dokumen Persyaratan

1. Dokumen persyaratan untuk **Pelamar Formasi UMUM** terdiri dari:

- a. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah dengan ketentuan Pas Foto terbaru Pakaian Formal;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (dibeli melalui <http://meterai-elektronik.com/>), format surat lamaran dapat diunduh melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> atau pada lampiran II pengumuman ini;
 - d. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (dibeli melalui <http://meterai-elektronik.com/>), format surat lamaran dapat diunduh melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> atau pada lampiran III pengumuman ini;
 - e. Surat keterangan bekerja dilengkapi portofolio di bidang kerja yang relevan dengan jabatan PPPK dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) tahun format surat lamaran dapat diunduh melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> atau pada lampiran IV dan VI pengumuman ini;
 - f. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - g. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - h. Bagi pelamar penyandang disabilitas, mengunggah:
 1. Hasil scan asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dalam 1 (satu) file format pdf; dan
 2. Video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mengirimkan file video tersebut melalui email <https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK/>. (ukuran maksimal video 20 MB).
2. Dokumen persyaratan untuk **Pelamar Formasi KHUSUS** terdiri dari:
- a. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah dengan ketentuan Pas Foto terbaru Pakaian Formal;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (dibeli melalui <http://meterai-elektronik.com/>), format surat lamaran dapat diunduh melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> atau pada lampiran II pengumuman ini;
 - d. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (dibeli melalui <http://meterai-elektronik.com/>) atau pada lampiran III pengumuman ini;
 - e. Surat keterangan bekerja dilengkapi portofolio di bidang kerja yang relevan dengan jabatan PPPK dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) tahun format surat dapat diunduh melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> atau pada lampiran IV dan VI pengumuman ini;
 - f. Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus untuk format surat dapat diunduh melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> atau pada lampiran V pengumuman ini;

- g. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - h. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
2. Pendaftaran online dan unggah dokumen persyaratan dengan format **PDF** dilakukan pada tanggal 20 September 2023 s.d 9 Oktober 2023 melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
 3. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah **scan berkas asli berwarna** (tidak hitam putih);
 4. Pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka/file tidak rusak dan terbaca dengan jelas;

C. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 20 September 2023 s.d 9 Oktober 2023;
2. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran online dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran online;
3. Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud.

D. Jadwal Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi (https://sscasn.bkn.go.id)	20 September 2023 s.d 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September 2023 s.d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 7 Desember 2023
13	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
14	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
15	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

E. Tahapan Seleksi

1. Tahapan Seleksi
 - a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah Melalui Laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

- b. Seleksi kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dalam seleksi kompetensi.
 - c. Seleksi Kompetensi memuat kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural;
2. Lokasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi akan disampaikan pada pengumuman selanjutnya.

F. Sistem Kelulusan

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman: <https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK/>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman: <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Bagi pelamar penyandang disabilitas dilakukan verifikasi dokumen pelamaran dengan mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada bagian B poin 1 huruf h angka 1 dan 2 untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Pelamar penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kemudian dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi, jika tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
3. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil *Computer Assisted Test* (CAT) yang memuat kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dengan memperhatikan jenis formasi yang sama;
4. Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan dihentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

G. Lain-Lain

1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui website resmi Seleksi Komnas HAM (<https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK/>);
2. Untuk dokumen yang menggunakan e-meterai 10.000, **setiap 1 (satu) e-meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen**;
3. E-meterai yang bisa digunakan **hanya e-meterai yang dibeli melalui <http://meterai-elektronik.com/>**, adapun tata cara pembelian dan penggunaan e-meterai dapat dilihat pada tautan <https://bit.ly/tutorial-e-meterai>;
4. Untuk dokumen yang menggunakan e-meterai 10.000 pelamar tidak perlu mencetak dokumen fisik, namun cukup mengunggah dokumen hasil unduhan yang telah dibubuhi e-meterai;
5. Pelamar diminta memastikan agar penempatan e-meterai 10.000 tidak tumpang tindih dengan tanda tangan digital yang dibubuhkan agar tidak mengganggu proses validasi e-meterai, dapat dilihat pada tautan <https://bit.ly/tutorial-e-meterai>;
6. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
7. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
8. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
9. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
11. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
12. Jika dalam mengikuti tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbukti peserta seleksi melanggar aturan dan ketentuan maka Panitia Seleksi berhak menggugurkan kepesertaan yang bersangkutan;
13. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
14. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
15. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
16. Semua pelamar disarankan dapat mengakses dan mempelajari bahan pada tautan <https://www.komnasham.go.id/#>, dan untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK/>. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi Call Center : Telepon 021-23599034 pada hari Senin s.d. Jumat Pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB (selama masa seleksi berlangsung).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2023
Kepala Biro Umum,
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Didit Eko Setiawan

LAMPIRAN I PENGUMUMAN
 NOMOR : 20/KP.02.00/IX/2023
 TENTANG PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 TAHUN ANGGARAN 2023

JABATAN, JALUR FORMASI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH FORMASI DAN PENEMPATAN

NO	JABATAN	JALUR FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	KHUSUS	D-IV ILMU HUKUM S-1 ILMU HUKUM	2	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS, BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	KHUSUS	S-1 MANAJEMEN D-IV MANAJEMEN S-1 PEMERINTAHAN D-IV PEMERINTAHAN S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN S-1 SOSIAL D-IV SOSIAL S-1 SOSIAL DAN POLITIK D-IV SOSIAL DAN POLITIK S-1 PERKANTORAN D-IV PERKANTORAN S-1 SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN D-IV SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	UMUM	S-1 MANAJEMEN D-IV MANAJEMEN S-1 PEMERINTAHAN D-IV PEMERINTAHAN S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN S-1 SOSIAL D-IV SOSIAL S-1 SOSIAL DAN POLITIK D-IV SOSIAL DAN POLITIK S-1 PERKANTORAN D-IV PERKANTORAN S-1 SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN D-IV SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
4	AHLI PERTAMA - PENATA MEDIASI SENGKETA HAK	KHUSUS	S-1 ILMU HUKUM S-1 KRIMINOLOGI	2	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN

	ASASI MANUSIA		S-1 PSIKOLOGI MASYARAKAT S-1 KETAHANAN NASIONAL S-1 SOSIOLOGI S-1 SOSIAL DAN POLITIK		HAM
5	AHLI PERTAMA - PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA	UMUM	S-1 ILMU HUKUM S-1 KRIMINOLOGI S-1 PSIKOLOGI MASYARAKAT S-1 KETAHANAN NASIONAL S-1 SOSIOLOGI S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
6	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	UMUM	S-1 PEKERJAAN SOSIAL D-IV PEKERJAAN SOSIAL S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	3	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
7	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 EKONOMI S-1 KEBIJAKAN PUBLIK S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN D-IV EKONOMI S-1 PEMERINTAHAN D-IV KEBIJAKAN PUBLIK S-1 EKONOMI AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN S-1 ADMINISTRASI NEGARA S-1 AKUNTANSI S-1 AKUNTANSI DAN MANAJEMEN S-1 AKUNTANSI KEUANGAN D-IV AKUNTANSI KEUANGAN D-IV AKUNTANSI DAN MANAJEMEN D-IV AKUNTANSI	7	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
8	AHLI PERTAMA - PERENCANA	UMUM	S-1 EKONOMI S-1 KEBIJAKAN PUBLIK S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN D-IV EKONOMI S-1 PEMERINTAHAN D-IV KEBIJAKAN PUBLIK S-1 EKONOMI AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN S-1 ADMINISTRASI NEGARA S-1 AKUNTANSI S-1 AKUNTANSI DAN MANAJEMEN S-1 AKUNTANSI KEUANGAN D-IV AKUNTANSI KEUANGAN D-IV AKUNTANSI DAN MANAJEMEN D-IV AKUNTANSI	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

9	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	KHUSUS	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK D-IV HUBUNGAN INTERNASIONAL D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL D-IV BROADCASTING D-IV ILMU KOMUNIKASI D-IV ILMU POLITIK D-IV KOMUNIKASI HUBUNGAN MASYARAKAT D-IV KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN D-IV PENYIARAN D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN S-1 ADMINISTRASI PUBLISISTIK/JURNALISTIK S-1 ADMINISTRASI KOMUNIKASI S-1 BROADCASTING S-1 DESAIN GRAFIS S-1 DESAIN WEB S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL S-1 HUBUNGAN KEMASYARAKATAN (PR) S-1 HUBUNGAN MASSA S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
10	TERAMPIL - ARSIPARIS	UMUM	D-III ARSIP D-III ARSIPARIS D-III ADMINISTRASI D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN D-III KEARSIPAN D-III KEARSIPAN DIGITAL D-III KOMUNIKASI D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN	1	SEKRETARIAT JENDERAL, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI ACEH
11	TERAMPIL - ARSIPARIS	UMUM	D-III ARSIP D-III ARSIPARIS D-III ADMINISTRASI D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN D-III KEARSIPAN D-III KEARSIPAN DIGITAL D-III KOMUNIKASI D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

12	TERAMPIL - ARSIPARIS	UMUM	D-III ARSIP D-III ARSIPARIS D-III ADMINISTRASI D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN D-III KEARSIPAN D-III KEARSIPAN DIGITAL D-III KOMUNIKASI D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN	1	SEKRETARIAT JENDERAL, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT
13	TERAMPIL - ARSIPARIS	UMUM	D-III ARSIP D-III ARSIPARIS D-III ADMINISTRASI D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN D-III KEARSIPAN D-III KEARSIPAN DIGITAL D-III KOMUNIKASI D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN	1	SEKRETARIAT JENDERAL, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI MALUKU
14	TERAMPIL - ARSIPARIS	UMUM	D-III ARSIP D-III ARSIPARIS D-III ADMINISTRASI D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN D-III KEARSIPAN D-III KEARSIPAN DIGITAL D-III KOMUNIKASI D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN	1	SEKRETARIAT JENDERAL, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
15	TERAMPIL - ARSIPARIS	UMUM	D-III ARSIP D-III ARSIPARIS D-III ADMINISTRASI D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN D-III KEARSIPAN D-III KEARSIPAN DIGITAL D-III KOMUNIKASI D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN	1	SEKRETARIAT JENDERAL, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI PAPUA
16	TERAMPIL - ARSIPARIS	UMUM	D-III ARSIP D-III ARSIPARIS	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO HUKUM, HUBUNGAN

			D-III ADMINISTRASI D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN D-III KEARSIPAN D-III KEARSIPAN DIGITAL D-III KOMUNIKASI D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN		MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
17	TERAMPIL - ARSIPARIS	KHUSUS	D-III SEMUA JURUSAN	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
18	TERAMPIL - ARSIPARIS	UMUM	D-III ARSIP D-III ARSIPARIS D-III ADMINISTRASI D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN D-III KEARSIPAN D-III KEARSIPAN DIGITAL D-III KOMUNIKASI D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN	1	SEKRETARIAT JENDERAL, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
19	TERAMPIL-PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	KHUSUS	D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA D-III MANAJEMEN PERKANTORAN D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN D-III ADMINISTRASI NEGARA D-III ADMINISTRASI PUBLIK D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN	4	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, BIRO UMUM
			TOTAL FORMASI	34	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2023
Kepala Biro Umum,
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Didit Eko Setiawan

Hal.10dari11

